

## **IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG**

**Tika Nur Rahayu**

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email: nurrahayutika@gmail.com

---

**Kata kunci:**

Sistem Informasi,  
Administrasi  
Kependudukan,  
Pencatatan Sipil

---

**ABSTRAK**

Pemerintah telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai yang menangani pelayanan administrasi kependudukan di Kota Tangerang. Sistem ini harus fleksibel dan efisiensi untuk menyimpan banyak data kependudukan. Sampai saat ini, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) telah diakses melalui internet ke seluruh 13 kecamatan di Kota Tangerang. Melalui jaringan komunikasi yang ada di masing-masing kecamatan, data penduduk akan langsung dimasukkan ke dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem informasi administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian implementasi sistem informasi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan wawancara dengan jumlah informan penelitian ini adalah 16 orang. Sementara dokumentasi data yang merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini sudah dikatakan berjalan dengan baik. Dengan adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini dapat membantu petugas dalam pengelolaan data kependudukan secara lebih teratur dan akurat. Namun kualitas sumber daya manusia dalam mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) masih kurang dan terdapat kurangnya operator dari beberapa kecamatan. Dalam hal ini SDM yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang terus mengupayakan untuk dapat mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Dengan adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang ini proses waktu penyelesaian pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dan rumit. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SIAK dalam waktu penyelesaian pelayanan sudah cukup baik. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah implementasi SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang terbilang terlaksana dengan baik.

---

**ABSTRACT**

---

**Keywords:**

Information Systems,  
Population  
Administration, Civil  
Registration

*The government has implemented a Population Administration Information System (SIAK) to improve the efficiency and effectiveness of the work of employees who handle population administration services in Tangerang City. The system must be flexible and efficient to store a lot of population data. Until now, the Population Administration Information System (SIAK) has been accessed via the internet to all 13 sub-districts in Tangerang City. Through the*

*communication network in each sub-district, population data will be directly entered into the database of the Population and Civil Registration Office. The purpose of this study is to determine the implementation of the population administration information system carried out by the Population and Civil Registration Office of Tangerang City. The research method used is qualitative descriptive with a research focus on the implementation of the population administration information system at the Population and Civil Registration Office of Tangerang City. Research is conducted by interviews, observation and documentation. The informant interviewed with the number of informants of this study was 16 people. While data documentation is records, transcripts, books, newspapers, magazines, inscriptions, meeting minutes, agendas and so on. The results of this study show that the mechanism of the Population Administration Information System (SLAK) has been said to run well. With the existence of the Population Administration Information System (SLAK), it can assist officers in managing population data more regularly and accurately. However, the quality of human resources in managing the Population Administration Information System (SLAK) is still lacking and there is a lack of operators from several sub-districts. In this case, the human resources owned by the Population and Civil Registration Office of Tangerang City continue to strive to be able to optimize their Human Resources (HR). With the Population Administration Information System (SLAK) at the Population and Civil Registration Office of Tangerang City, the service completion time process becomes faster and easier so it does not take a long and complicated time. This shows that the implementation of SLAK in service completion time is quite good. The conclusion in this study is that the implementation of SLAK in the Population and Civil Registration Office of Tangerang City is fairly well implemented.*

---

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang besar dalam hal jumlah penduduk, di mana berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa sehingga tercatat sebagai negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat (Badan Pusat Statistik, 2021). Jumlah penduduk yang besar tentunya perlu mendapatkan perhatian karena pemerintah dituntut untuk lebih bekerja keras dalam melakukan pencatatan data kependudukan secara akurat dan lengkap sehingga dapat mendukung terpenuhinya informasi kependudukan.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar menyebabkan kebutuhan administrasi kependudukan yang terorganisir mulai dari pencatatan di tingkat pusat hingga tingkat daerah. Administrasi kependudukan menjadi semakin penting karena selalu dibutuhkan untuk berbagai aktivitas-aktivitas kehidupan di Indonesia seperti saat pemilihan umum (legislatif, presiden, maupun kepala daerah), mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain-lain. Disamping itu, dengan administrasi kependudukan yang tercatat

## *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang*

dengan rapi dan selalu *update* maka pemerintah bisa mengetahui mengenai kondisi jumlah penduduk. Bagi pemerintah dengan adanya administrasi kependudukan memberikan manfaat dalam merumuskan kebijakan, membuat rencana, dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Untuk memenuhi kebutuhan administratif masyarakat, negara harus menyediakan pelayanan administrasi kependudukan sebagai bagian dari pelayanan publik. Tujuan administrasi kependudukan adalah untuk menentukan status kewarganegaraan seorang penduduk yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang dimilikinya. Oleh karena itu, administrasi kependudukan merupakan kebutuhan penting untuk dipenuhi. Untuk alasan ini, setiap pemerintah daerah harus menyediakan layanan administrasi kependudukan.

Setiap peristiwa kependudukan perlu untuk dicatat dalam suatu dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan terdiri dari Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, dan surat keterangan pindah.

SIAK dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri dengan maksud memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Melalui jaringan komunikasi dan informasi, sistem aplikasi ini diharapkan mampu mengatasi segala persoalan dalam pengelolaan data kependudukan serta membantu dinas terkait dalam melakukan pelayanan seperti pelayanan KTP, KK, Akta Kelahiran dan Kematian, KIA, Akta Nikah dan Cerai. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dimaksudkan untuk: (1) terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib; (2) terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan; (3) terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional; (4) tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan (Tambunan, 2016:547).

## *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang*

Dalam pelaksanaannya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terdiri dari beberapa komponen, termasuk aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dioperasikan melalui sistem data base dan jaringan komunikasi. Komponen-komponen ini diuraikan sebagai berikut: Aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibangun sebagai bagian dari layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selanjutnya dilakukan dalam bentuk aplikasi penginputan data ke dalam komputer, di mana kumpulan data yang telah dikumpulkan secara bertahap dimasukkan, mulai dari RT, RW, Desa, dan Kecamatan. Data kecamatan kemudian dimasukkan ke dalam data base kependudukan Kabupaten/Kota untuk diolah. Aplikasi layanan dokumen kependudukan, salinan akta-akta, modul verifikasi, pelaporan, dan penyebaran informasi memudahkan pengolahan data base untuk kepentingan manajemen pengambilan keputusan di tingkat kabupaten dan kota.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab atas pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di tingkat kabupaten dan kota. Salah satu lembaga pemerintah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang bertanggung jawab untuk mencatat kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan anak, dan pengakuan anak. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membentuk Departemen Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didirikan dengan tujuan untuk membangun sistem tata kelola dokumen kependudukan, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan melalui peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan menyediakan sumber daya aparatur profesional untuk mengelola administrasi kependudukan.

Alasan peneliti memilih Kota Tangerang dalam penelitian ini karena peneliti tinggal di Kota Tangerang. Berikut ini data kepadatan penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten (Jiwa/Km<sup>2</sup>):

**Tabel 1.1**  
**Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Jiwa/Km<sup>2</sup>) Tahun 2020-2022**

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Jiwa/Km <sup>2</sup> )		
	2020	2021	2022
Kab Pandeglang	463	469	472

*Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang*

Kab Lebak	405	411	433
Kab Tangerang	3.208	3.255	3.262
Kab Serang	936	950	1.142
Kota Tangerang	12.314	12.421	10.825
Kota Cilegon	2.478	2.517	2.771
Kota Serang	2.595	2.642	2.710
Kota Tangerang Selatan	9.201	9.278	8.361
Provinsi Banten	1.232	1.248	1.310

**Sumber: Badan Pusat Statistik Banten, 2023**

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk di Kota Tangerang cukup tinggi dengan persebarannya yang luas. Data yang terdapat pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penduduk di Kota Tangerang mengalami peningkatan dan mengalami penurunan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kota Tangerang adalah 12.314 jiwa dan pada tahun 2021, jumlah penduduk di Kota Tangerang mengalami peningkatan yaitu 12.421 jiwa sedangkan pada tahun 2022, jumlah penduduk di Kota Tangerang mengalami penurunan yaitu 10.825 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi ini, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sangat berperan penting dalam melakukan pemetaan data kependudukan serta melakukan pengelolaan data kependudukan demi tercapainya tertib administrasi kependudukan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat di Kota Tangerang. Sedangkan untuk data persentase penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2**  
**Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen) Tahun 2020-2022**

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen)		
	2020	2021	2022
Kab Pandeglang	10,69	10,68	10,67
Kab Lebak	11,65	11,67	11,70
Kab Tangerang	27,26	27,31	27,36
Kab Serang	13,63	13,66	13,70
Kota Tangerang	15,92	15,85	15,76
Kota Cilegon	3,65	3,66	3,68
Kota Serang	5,81	5,84	5,88
Kota Tangerang Selatan	11,38	11,32	11,25
Provinsi Banten	100,00	100,00	100,00

2020: Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September)  
2021-2022: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)

**Sumber: Badan Pusat Statistik Banten, 2023**

Berdasarkan data di atas, persentase penduduk di Kota Tangerang berada di posisi kedua dengan jumlah persentase penduduk yang cukup tinggi setelah Kabupaten Tangerang. Data yang terdapat pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 persentase penduduk di Kota Tangerang adalah 15,92%. Sedangkan pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 15,85% dan 15,76%. Dari data persentase tersebut, dengan hadirnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang diharapkan pengelolaan data kependudukan menjadi lebih mudah, cepat, dan akuntabel.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Tangerang. Hal ini sesuai dengan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Tangerang diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dokumen kependudukan yang berlaku di wilayah kota Tangerang terdiri dari Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang telah memberlakukan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam melakukan pencatatan data kependudukan. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang telah terintegrasi dengan data di tingkat provinsi dan pusat. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berguna dalam mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data kependudukan secara cepat dan akurat agar menghasilkan informasi kependudukan yang tepat guna untuk membantu pemerintahan dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Produk SIAK meliputi akte kelahiran, kartu keluarga, e-KTP, KIA, akte kematian, akte cerai, dan akte nikah. Untuk pelayanannya meliputi rekam KTP-elektronik, cek NIK Kota Tangerang, gabung kartu nikah, pengajuan kartu keluarga dan e-KTP (bagi WNA), perbaikan kartu

keluarga, pembuatan kartu keluarga baru, pengesahan anak, perbaikan KTP-elektronik, pindah kartu keluarga antar kota, pisah kartu keluarga, ubah data WNI, dan sinkronisasi data (sumber: aplikasi sobat dukcapil). Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil data jumlah penduduk, kepemilikan pada e-KTP, dan akta kelahiran (di Kota Tangerang) karena masih banyak permasalahan yang terjadi seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya e-KTP, dan akta kelahiran pada kehidupan masyarakat. Berikut ini data jumlah penduduk, kepemilikan e-KTP, dan akta kelahiran di Kota Tangerang:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk Kota Tangerang Tahun 2022**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Jumlah</b>
0 – 4	165.321
5 – 9	157.097
10 – 14	151.216
15 – 19	143.398
20 – 24	145.991
25 – 29	159.346
30 – 34	162.528
35 – 39	170.536
40 – 44	160.565
45 – 49	140.364
50 – 54	115.551
55 – 59	95.282
60 – 64	71.070
65 – 69	50.638
70+	41.653
<b>Total</b>	<b>1.930.556</b>
<b>Wajib Rekam KTP</b>	<b>1.351.742</b>
<b>Belum Wajib Rekam KTP</b>	<b>578.814</b>

**Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2022**

Data yang terdapat pada tabel 1.3 menunjukkan jumlah penduduk, dan yang wajib maupun belum untuk melakukan rekam KTP di Kota Tangerang.

## *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang*

Ketercapaian kepemilikan e-KTP di Kota Tangerang semester I tahun 2022 mencapai 99,0%. Ketercapaian tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun, sebagian besar wilayah kecamatan di Kota Tangerang masih di bawah 99% yaitu kecamatan Tangerang, Jatiuwung, Batuceper, Cipondoh, Ciledug, Periuk, Cibodas, Neglasari, dan Pinang. Di sisi lain terdapat beberapa wilayah kecamatan yang ketercapaian kepemilikan e-KTP di atas 99% yaitu Benda, Karawaci, Karang Tengah, dan Larangan.

Ketercapaian kepemilikan akta kelahiran di Kota Tangerang semester I tahun 2022 mencapai 95,12% yang masih berada di bawah target yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebesar 97%. Kepemilikan akta kelahiran di keseluruhan 13 kecamatan Kota Tangerang masih di bawah target 97%.

Data yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang menunjukkan masih belum maksimalnya pencapaian kepemilikan dokumen kependudukan seperti e-KTP, dan akta kelahiran. Hal ini dikarenakan berdasarkan wawancara dengan Bapak Debi dan Bapak Martin selaku pegawai bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang didapatkan informasi bahwa masih ada kendalanya dalam implementasi sistem informasi administrasi kependudukan. Kendala yang terjadi adalah:

*Pertama*, Server pusat yang terkadang mengalami *down* atau sibuk sehingga proses administrasi kependudukan menjadi berhenti. Hal ini terjadi karena adanya jaringan yang bermasalah pada saat proses administrasi kependudukan seperti server yang tiba-tiba error dan terjadi dalam waktu yang tidak bisa ditentukan.

*Kedua*, Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) yang kurang lancar antara *server* dengan *client* di daerah. Beberapa kecamatan di Kota Tangerang menyebutkan jika jaringan sistem/internet yang tiba-tiba offline sehingga mengganggu pelayanan administrasi kependudukan. Dan juga web belum 100% sempurna, sering error seperti contoh pada saat mencari NIK dengan nama Dian di web kependudukan dan pencatatan sipil yang muncul bernama Agung hal ini tidak sinkron yang terjadi dalam waktu 1 hari atau 2 hari.

*Ketiga*, Spesifikasi komputer yang kurang memadai seperti komputer menjadi lambat. Komputer sangat dibutuhkan dalam pelayanan administrasi kependudukan maka dari itu dibutuhkan komputer yang baik dan tidak lambat pada saat pelayanan administrasi kependudukan

## *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang*

berlangsung. Hal ini juga terjadi di Kecamatan Ciledug yang terdapat komputer yang lambat atau sudah seharusnya diganti oleh pemerintah.

*Keempat*, Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan data kependudukan seperti e-KTP, dan akte kelahiran. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, ketercapaian kepemilikan e-KTP, dan akte kelahiran di beberapa wilayah Kota Tangerang belum mencapai target dari Kementerian Dalam Negeri. Sebagai kota yang jumlah kepadatan penduduknya cukup tinggi diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang memberikan informasi terkait pengurusan administrasi kependudukan seperti pengurusan e-KTP, dan akte kelahiran agar target yang sudah ditetapkan tercapai. Dengan adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), masyarakat sudah seharusnya mengurus data kependudukan melalui online sehingga masyarakat tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan data kependudukan yang dibutuhkan seperti e-KTP, dan akte kelahiran.

Pelaporan data kependudukan ini berpengaruh pada data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, karena ketika banyak masyarakat yang tidak melaporkan data kependudukannya maka sangat sulit untuk mendapatkan data penduduk yang valid terutama penduduk yang pindah dan meninggal.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.”

### **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan informasi dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta menjelaskan hasil-hasil temuan di lapangan kemudian diolah menjadi kalimat. Pada penelitian kualitatif, kajian yang dilakukan oleh peneliti bersifat kasuistik yang tidak dapat digeneralisasi, sehingga implementasi sistem informasi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tidak bisa digunakan untuk menjelaskan implementasi SIAK di kota lain. Penelitian ini termasuk dalam metode deskriptif karena menggambarkan atau mendeskripsikan implementasi sistem informasi administrasi kependudukan di Dinas

## *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang*

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumentasi pribadi dan dokumen resmi lainnya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Komunikasi**

Mekanisme pelaksanaan adalah serangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk menjalankan atau melaksanakan suatu tindakan atau kegiatan. Mekanisme pelaksanaan dalam penelitian ini merupakan bentuk komunikasi antar instansi pemerintahan di wilayah Kota Tangerang. Ini bisa berupa serangkaian aturan, prosedur, atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang terdapat dalam Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang bahwa mekanisme Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini sudah dikatakan berjalan dengan baik. Manfaat dari adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini salah satunya adalah dapat membantu petugas dalam pengelolaan data kependudukan secara lebih teratur dan akurat. Hal ini memungkinkan petugas untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, warga dapat dengan cepat mendapatkan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, dan KTP dengan lebih mudah dan cepat. Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang terkait jaringan. Kendala di jaringan dapat memperlambat proses pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) atau bahkan membuatnya tidak berfungsi sepenuhnya. Jika jaringannya tidak stabil, hal itu bisa menghambat akses dan pengelolaan data penduduk secara efisien.

#### **Sumber Daya**

Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam mendukung implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang didukung oleh tiga aspek sumber daya manusia, yaitu 52 ASN, pendidikan untuk S1

## *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang*

ada 33 pegawai, S2 ada 6 pegawai, SMA ada 14 pegawai. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa kualitas sumber daya manusia dalam mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) masih kurang dan terdapat kurangnya operator dari beberapa kecamatan. Dalam hal ini SDM yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang terus mengupayakan untuk dapat mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Meskipun demikian, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang telah berhasil dengan baik, hal tersebut terbukti dari pelayanan yang baik dan ramah dari para staff.

### **Disposisi**

Waktu penyelesaian pelayanan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan tonggak penting yang mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam memberikan layanan terkait data penduduk, menjadi penentu utama dalam menilai efisien operasional serta kualitas respons terhadap masyarakat, informasi yang jelas diperlukan untuk menetapkan kepastian dan batas waktu dalam penyelesaian layanan publik.

Dengan adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang ini proses waktu penyelesaian pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dan rumit. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SIAK dalam waktu penyelesaian pelayanan sudah cukup baik.

### **Struktur Birokrasi**

*Menurut Edward III struktur birokrasi* merupakan faktor penting ke empat dalam implementasi kebijakan publik. Dimana struktur birokrasi ini memiliki dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik. Dua karakteristik tersebut adalah:

- a. Membuat Standar Operating Procedures (SOPs) adalah suatu aktivitas rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan fragmentasi yaitu tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

## *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang*

Struktur birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang telah berjalan cukup baik dalam melaksanakan tugas menjadi mudah sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa sudah terdapat prosedur dalam administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang beserta menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan kelurahan maupun kecamatan di Kota Tangerang.

### **KESIMPULAN**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dan juga fokus penelitian yaitu implementasi sistem informasi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dengan teori yang digunakan yaitu model Edward III (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat server SIAK mengalami error hal ini menyebabkan proses administrasi kependudukan menjadi terhenti.
2. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan SIAK terkait dengan jaringan yang melemah dan dapat menghambat proses penyelesaian pelayanan kependudukan.
3. Terdapat komputer yang kurang memadai pada saat pelayanan administrasi kependudukan sehingga pelayanan tidak efisien.
4. Terdapat kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya mengurus data kependudukan.

Namun demikian, dari kesimpulan diatas dapat dikatakan bahwa implementasi SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang terbilang terlaksana dengan baik

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Adapun saran peneliti adalah sebagai berikut:

## *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang*

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang perlu menambahkan petugas untuk mengurangi beban kerja yang berlebihan dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang perlu meningkatkan infrastruktur jaringan internet guna memastikan akses cepat dan stabil dalam pengelolaan data kependudukan.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya melaporkan atau mengurus data kependudukan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang perlu meningkatkan pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, M. (2017). *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Amrizal, D. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Anggraeni, E. Y. & Irviani, R. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Bastianon., Santosa, B., Gucci, R. S., Setiawan, T. Darusman, Y. M. (2020). *Sosialisasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan*. *Jurnal Abdimas*, 1(3), 34-41.
- BPS. (2021). *Analisis Profil Penduduk Indonesia: Mendeskripsikan Peran Penduduk Dalam Pembangunan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Firmanzah. (2016). *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hidayat, F. (2019). *Konsep Dasar Sistem Informasi Kesehatan*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Hutahaean, J. (2015). *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Jai, S. A., Setyawan, D. & Adiwidjaja, I. (2016). *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Tunggulwulung Kota Malang*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1), 34-38.
- Karso, A, J. (2021). *Implementasi Kebijakan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sebagai Kepala Pemerintahan di Pelabuhan*. Cirebon: Penerbit Insania.
- Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(2), 8-17
- Kurhayadi., Rohayati, Y. & Sucipto, B. (2020). *Kebijakan Publik di Era Digitalisasi*. Yogyakarta: Deepublish.

*Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang*

- La Tarifu. (2020). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 3(2), 233-246.
- Lathifah, I. N., Suryono, A. & Hadi, M. (2014). Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dengan Menggunakan Kartu Jakarta Sehat. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 175-181.
- Laudon, K. C. & Laudon, J. P. (2018). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. New York: Pearson Education.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Purba, F., Tarigan, U., Nasution, I. & Suharyanto, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. *Jurnal Perspektif*, 8(2), 77-83.
- Revida, E., Aisyah, S. & Pardede, A. (2021). *Manajemen Publik*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Saputra, T., & Astuti W. (2018). *Suara Pelayanan Publik: Reformasi Birokrasi Melalui Inovasi Pelayanan Publik*. Surabaya: Jakad Publishing.
- Silitonga, D. (2022). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*. Banyumas: Zahira Media Publisher.
- Subarsono, AG. 2012. *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. S. (2016). *Glosarium Istilah Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Taufiqurokhman., Wekke, I. S., Saleh, A. M. & Andriansyah. (2021). *Pendidikan Dalam Tinjauan Administrasi Publik: Teori & Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Tjilen, A. P. (2019). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Ulum, M Chazienul. (2018). *Public Service: Tinjauan Teoretis dan Isu-isu Strategis Pelayanan Publik*. Malang: UB Press.
- Warsito, H. T. (2016). *Implementasi Program E-Kios sebagai Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Kelurahan Kebraon Kota Surabaya*.



**This work is licensed under a**  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License